



# RENCANA KERJA 2025

DPPKB KAB. SUKABUMI



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap lembaga wajib menyusun dan menyajikan renja, oleh sebab itu DPPKB telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagai alat panduan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan serta sebagai bahan penilaian kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja seluruh personil lembaga, baik secara individu maupun sebagai bagian dari “*teamwork*”, agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu , Rencana Kerja (RENJA) ini juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan berfungsi sebagai bahan panduan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan serta untuk mendukung data-data dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada publik khususnya Bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana guna mewujudkan “ penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Kecil berkualitas, Bahagia Sejahtera” menuju kabupaten sukabumi lebih baik.

Akhirnya, kritik serta sumbang saran pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan koreksi dan untuk penyempurnaan pembuatan Rencana Kerja (RENJA) DPPKB di masa-masa yang akan datang.

Sukabumi, Agustus 2024

Kepala DPPKB  
Kabupaten Sukabumi



**Drs. UUS PIRDAUS, MM**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19680520 199503 1 005

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKB TAHUN 2024 .....</b>	<b>13</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKB .....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB .....	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB .....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	17
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan .....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKB .....	24

<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKB KABUPATEN SUKABUMI...</b>	<b>25</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1. Kesimpulan .....	53
5.2. Saran – Saran .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai kondisi baik yang bersifat lokal maupun global yang perlu dipertimbangkan. Berkaitan dengan Corona Virus Disease- 19 (COVID-19) pada khususnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia masuk ke era endemi Covid-19. Hal

ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran berharga yang tidak hanya dipandang sebagai ujian saja, tetapi juga peluang baru dalam melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang - peluang yang ada. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengambil langkah komprehensif dan antisipatif serta inovatif dalam percepatan pemulihan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Diproyeksikan pada tahun 2025 kondisi perekonomian indonesia dapat kembali pulih dan telah terlepas dari tekanan Pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh pula pada kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi dengan semakin banyak sektor ekonomi yang kembali beroperasi.

Perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 2 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 untuk pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun, RPJMD Tahun 2021-2026 untuk pembangunan periode 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan 1 (satu) tahun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2025 maka disusunlah dokumen RKPD tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat ringkasan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9 secara substansi menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan secara proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022; (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026; (4) RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025; (5) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032; (6) Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; (7) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (8) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; serta (9) Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, tema pembangunan pada Tahun 2025 adalah **“Pemantapan daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur daerah”**. Pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025 diarahkan kepada peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka memantapkan daya saing perekonomian Kabupaten Sukabumi. RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026, sedangkan RPJMD periode 2021-2026 merupakan periode lima tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025.

RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 disusun dengan mengidentifikasi isu strategis, permasalahan serta program prioritas daerah guna menjawab proyek prioritas serta menyelesaikan target-target sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan diawali dengan Kick Off Meeting perencanaan 2025, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui Peraturan Bupati tentang Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Untuk memastikan bahwa dokumen RKPD merupakan hasil kesepakatan multi pihak, maka dalam prosesnya dilakukan pembahasan-pembahasan dalam bentuk forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi dan keterkaitan dengan tema pembangunan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP 2025 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, tema pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah **“Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**; dan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah **“Pemantapan daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur daerah”**. Ketiga tema tersebut saling terkait satu sama lain dengan benang merah bagaimana meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur.

Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan lembaga yang melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan yang ada guna mendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam mewujudkan visi misi bupati terpilih 2021-2026. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki kewajiban dalam penyusunan Rencana Awal Perangkat Daerah.

Mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu;1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program BANGGA KENCANA sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan

berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga diharapkan mampu menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dilakukan dengan berorientasi pada proses dan substansi dengan menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan holistik-tematik yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua, pendekatan integratif yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial yang dilaksanakan dengan memperhatikan dimensi ruang dalam perencanaan pembangunan. Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai pedoman seluruh Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
29. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7).

46. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2025. Di samping itu, RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Selain itu, RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun berkenaan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2025;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; serta
5. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintahan, maupun antar pelaku pembangunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan rencana kerja sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPPKB
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKB

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKB KABUPATEN SUKABUMI

- 4.1 Program dan Kegiatan DPPKB yang memuat: indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikator dan sumber dana

## BAB V

### PENUTUP

- 5.2 Kesimpulan
- 5.3 Saran– Saran

## **BAB II**

### **Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPPKB Kabupaten Sukabumi.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Terdiri dari 4 (empat) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

##### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

###### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

###### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

###### **d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

###### **e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

###### **f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

###### **g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

## **B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

### **a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
2. Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

### **b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

## **C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

### **a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**

1. Pengendalian Program KKBPK
2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
4. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
6. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

### **b. Pendetayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

### **c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
5. Peningkatan Kesertaan KB Pria

**d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

**a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan keluarga)
2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
3. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 ditunjang anggaran sebesar Rp. 55.969.696.761,-.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggunakan indikator yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

### TARGET KINERJA BERDASARKAN IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD ( 2021 )	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	-	2.50	2.47	2.43	2.40	2.35	2.50	2.50
		Persentase Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi	69.62	68.10	68.30	68.36	68.45	68.50	68.10	68.10
		Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB	82.50	82.53	82.65	82.76	82.85	83.00	82.53	82.53

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih terdapat permasalahan yang menjadi issue utama yaitu:

- a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- b. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
- c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)
- f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun berdasarkan RKPD yang juga berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Pada awal tahun RPJMD ini masih mengacu kepada dua kebijakan yaitu kebijakan yang menjembatani masa transisi pemerintahan baru sambil menunggu penetapan RPJMD bupati yang terpilih 2021-2026. Namun demikian untuk DPPKB tidak banyak program yang berubah artinya masih sama dengan program yang sebelumnya. Sesuai Dokumen RPJMD 2021-2026 sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam kebijakan bidang kesehatan yang berfokus diluar pelayanan dasar yaitu mengendalikan jumlah kelahiran dengan tujuan agar penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas keluarga.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dituangkan dalam bentuk program antara lain :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

### **1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

- a. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
- b. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- c. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
- d. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
- e. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
- f. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
- g. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
- h. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
- i. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
- j. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

- k. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
  - l. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
  - m. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
  - b. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
  - c. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

### **C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

- 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**
- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
  - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
  - d. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
  - e. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  - f. Pengendalian Program KKBPK
- 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**
- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
  - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- d. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
- e. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- f. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
- g. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- h. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- i. Peningkatan Kesertaan KB Pria

**4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**

- a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

**1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- c. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- d. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- f. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
- a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - c. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan**

##### **Kebijakan**

Sesuai dengan arah kebijakan Bupati terpilih periode 2021-2026 bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan kebijakan “Peningkatan Sumber Daya Masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, social, agama, budaya, pemuda dan olah raga”. Kebijakan tersebut berada di **peningkatan pelayanan kesehatan non pelayanan dasar**, sekaligus mengacu kepada keputusan pemerintah pusat bahwa BKKBN berada dalam lingkup dan koordinasi kementerian kesehatan. Adapun urusan yang dilaksanakan, yaitu :

##### **1. Pengendalian Penduduk**

- a) Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Pemantapan dan sinergitas program sekolah siaga kependudukan (SSK).

##### **2. Keluarga Berencana (KB)**

- a) Pengoptimalan pelaksanaan penggarapan khusus (Rapsus)
- b) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- c) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
- d) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
- e) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

##### **3. Keluarga Sejahtera**

- a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pengoptimalan peran kampung keluarga kecil berkualitas (KKB) atau kampung keluarga berencana (KB) di masing-masing desa sebagai basis penggerakan pemberdayaan ketahanan keluarga dan pelestarian para peserta KB.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKB**

#### **Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing tujuan paling utama untuk :

- a. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
- b. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP
- c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d. Penguatan pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Keluarga.

#### **Sasaran**

Adapun kegiatan Renja Tahun 2025 bidang keluarga berencana diarahkan untuk :

- a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- b. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
- c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
- d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)
- f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKB KABUPATEN SUKABUMI**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							55,719,696,761.00							0.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55,719,696,761.00								0.00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						55,719,696,761.00								0.00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	25,570,776,761.00						-		0.00	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	323,700,000.00			-	-	-	-		0.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	51,200,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dokumen DPA-SKPD													BERENCANA
2.14.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	110,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	82,500,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13,843,531,961.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/bulan	13,552,951,961.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	138,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	80,830,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	34,650,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	11,200,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	25,900,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	147,104,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	76,024,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	21,080,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	805,110,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	660,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	77,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	18,110,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.07.005	Pengadaan Mebel														
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				47 Unit	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				47 Unit	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9,042,930,800.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	118,800,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	8,924,130,800.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,358,400,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	1,258,400,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>				1 Unit	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK</b>	-	-			-	<b>965,920,000.00</b>						-	<b>0.00</b>	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	400,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.01.002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.01.004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.02.2.01.007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.02.2.01.008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.2.01.009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.02.2.01.016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
		Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.02.2.01.017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal														
		<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal</i>				1 Kegiatan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														
		<i>Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal</i>				1 Kegiatan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
		<i>Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan</i>				2 Kegiatan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	565,920,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.02.002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
		<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.02.010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		<i>Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.02.011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
		<i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya</i>				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
		<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>				1 Laporan	115,920,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
		<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
		<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>				47 Unit	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
		<i>Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
		<i>Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	-	-			-	<b>15,703,000,000.00</b>						-	<b>0.00</b>	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	4,479,400,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk</i>				1 Laporan	120,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.03.2.01.010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				1 Laporan	3,252,400,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.03.2.01.011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
		<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				1 Laporan	705,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	112,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	240,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.03.2.01.014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
		<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				1 Organisasi	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	2,211,600,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.03.2.02.002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
		<i>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia</i>				386 Unit	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
		<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				386 Orang	2,161,600,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5,586,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				12000 Orang	4,956,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA
2.14.03.2.03.006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
		<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				47 Unit	330,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.03.2.03.007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>				386 Orang	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.03.013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria</i>				100 Orang	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	3,426,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.04.002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.03.2.04.006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				211 Kampung	3,376,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	-	-			-	<b>13,480,000,000.00</b>						-	<b>0.00</b>	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	13,430,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.04.2.01.008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.04.2.01.0 016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
		<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>				1 Laporan / Dokumen	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.04.2.01.0 017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
		<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				20 Unit	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				386 Orang	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.14.04.2.01.0 024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya				6300 Orang	6,930,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>operasional kegiatan</i>													
2.14.04.2.01.0 026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
		<i>Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				1 Kelompok	6,300,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK- BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	50,000,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	50,000,000.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>				12 laporan	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.14.04.2.02.006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
		<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</i>				12 laporan	0.00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0.00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
<b>J U M L A H</b>								<b>55,719,696,761.00</b>							<b>0.00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akhirnya secara umum penyusunan Renja dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Rangka Melaksanakan kegiatan tahunan sebelum menyusun kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) perlu disusun sebuah rencana awal (Ranwal) masing – masing perangkat daerah agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terukur sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki.
2. Renja ini juga sekaligus bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025 untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan.
3. Pada prinsipnya renja ini hanya sebagai panduan umum kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam perjalanannya masih memungkinkan untuk dilakukan review sesuai dengan masukan dan evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya.

#### **5.2 Saran - Saran**

Untuk menyempurnakan penyusunan renja sesuai dengan peraturan yang ada, perlu didukung oleh kemampuan teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, agar kualitas tenaga perencana di masing-masing perangkat daerah memiliki kemampuan yang memadai, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas para perencana di masing-masing perangkat daerah.